

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT															
VISI : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG PROFESIONAL DAN DEMOKRATIS															
Misi 1 :		Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Idiologi Negara dan Cinta Tanah Air		Misi 2 :		Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Dalam Upaya Menjaga Harmonisasi dan Kondusivitas Daerah		Misi 3 :		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan		Misi 4 :		Meningkatkan Kualitas Demokrasi Melalui Pendidikan Politik Masyarakat	
Tujuan 1 :		Terwujudnya Pengamalan Masyarakat Jawa Barat Terhadap Konsensus Nasional, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika		Tujuan 2 :		Terwujudnya Stabilitas yang Kondusif serta Harmonisasi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Tujuan 3 :		Terwujudnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan di Jawa Barat		Tujuan 4 :		Terwujudnya Kehidupan Politik Masyarakat Jawa Barat yang Demokratis, Sehat, dan Santun	
Sasaran 1 :		Meningkatnya Penolakan dan Antipati masyarakat terhadap radikalisme dan intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat		Sasaran 2 :		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum serta Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat, Baik Antar Suku, Agama, dan Golongan		Sasaran 3 :		Meningkatkan Kualitas Kehidupan dan Kohesi Sosial serta Pemberdayaan Ormas Guna Terpeliharanya Kehidupan Masyarakat yang Kondusif		Sasaran 4 :		Meningkatkan Demokrasi yang Sehat dan Partisipasi Politik Masyarakat	
1,1	Tingkat keberhasilan pencapaian <i>zero growth</i> perkembangan kelompok radikal di Jawa Barat			2,1	Persentase penurunan konflik sosial di Jawa Barat			3,1	Tingkat keberhasilan pencapaian <i>zero growth</i> konflik terkait kerukunan antar umat beragama			4,1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Barat		
												4,2	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada		
1,2	Tingkat keberhasilan pencapaian <i>zero growth</i> kasus yang berlatar belakang suku, ras, dan antar golongan			2,2	Persentase penurunan aksi unjuk rasa di Jawa Barat			3,2	Jumlah Ormas yang berperan secara aktif dalam pembangunan Jawa Barat			4,3	Persentase penurunan sengketa Pemilu atau Pemilukada di Jawa Barat		

KEPALA BIDANG IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN		KEPALA BIDANG KEWASPADAAN DAERAH		KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA, DAN KEMASYARAKATAN		KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI		SEKRETARIS	
1.1.1	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan ideologi bangsa dan bela negara	2.1.1	Persentase realisasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Jawa Barat	3.1.1	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan tentang kerukunan antar umat beragama	4.1.1	Persentase peningkatan parameter Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Barat	5.1.1	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan
		2.1.2	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan pencegahan peningkatan konflik sosial dan konflik lokal			4.2.1	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018 di Jawa Barat	5.1.2	Persentase data kepegawaian dan data aset yang akurat
1.2.1	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda sebagai kader-kader pembauran kebangsaan	2.1.3	Jumlah kabupaten/kota yang termonitor keberadaan dan kegiatan orang asing di	3.2.1	Jumlah Ormas yang mendaftarkan keberadaanya ke Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	4.3.1	Tingkat legitimasi hasil Pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018 di Jawa Barat	5.1.3	Tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan
		2.2.1	Persentase peningkatan cegah dini dan advokasi rencana aksi unjuk rasa di Jawa Barat						

KASUBID IDIOLOGI NEGARA DAN BELA NEGARA		KASUBID WAWASAN KEBANGSAAN DAN PEMBAURAN BANGSA		KASUBID KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA DAERAH INTELIJEN		KASUBID PENANGANAN KONFLIK DAN PENGAWASAN LEMBAGA/ORANG ASING		KASUBID KETAHANAN SOSIAL, SUMBER DAYA ALAM, DAN EKONOMI		KASUBID KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEPERCAYAAN, SERTA ORMAS		KASUBID FASILITASI PARPOL DAN PEMILU		KASUBID FASILITASI KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN POLITIK		KASUBAG KEUANGAN		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		KASUBAG PERENCANAAN DAN PROGRAM	
1.2.1.1	Jumlah anggota masyarakat yang mengikuti pemantapan Idiologi Bangsa dan Bela Negara	1.1.1.1	Jumlah anggota masyarakat yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan dan pembauran	2.1.1.1	Persentase Pelaporan Rencana Aksi Provinsi dan Kab/Kota yang tepat waktu	2.2.1.1	Persentase penurunan permasalahan akibat keberadaan Lembaga/Orang Asing di Jawa	3.1.1.1	Jumlah peserta dialog kerukunan antar umat beragama	3.2.1.1	Jumlah Ormas yang mengikuti pembinaan oleh Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	4.1.1.1	Persentase Parpol yang menyerahkan pertanggungjawab an bantuan keuangan tepat waktu	4.1.1.2	Tingkat pemahaman pelajar dan mahasiswa terhadap pendidikan budaya dan etika politik	5.1.1.1	Persentase terselesaikannya dokumen laporan keuangan tepat waktu	5.1.2.1	Persentase data aset yang valid	5.1.1.3	Persentase peningkatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
				2.1.2.1	Persentase penurunan konflik sosial yang terjadi di Jawa Barat							4.2.1.1	Persentase "Golput" dalam Pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018 di Jawa Barat					5.1.2.2	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas		
1.2.1.2	Tingkat pemahaman peserta terhadap Idiologi Bangsa dan Bela Negara	1.1.1.2	Tingkat pemahaman peserta terhadap wawasan kebangsaan dan	2.1.2.2	Jumlah unjuk rasa yang terkendali di wilayah Jawa Barat	2.2.1.2	Persentase Lembaga/Orang Asing yang keberadaannya terawasi oleh Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	3.1.1.2	Jumlah peserta pemberdayaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan SDA masyarakat berbasis kearifan lokal	3.2.1.2	Persentase Ormas yang menyerahkan laporan penggunaan bantuan hibah secara tepat waktu	4.3.1.1	Jumlah sengketa dalam Pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018 di Jawa Barat	4.1.1.3	Persentase peningkatan IDI Jawa Barat pada aspek Lembaga Demokrasi	5.1.1.2	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	5.1.3.1	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu	5.1.1.5	Persentase penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu
																5.1.3.2	Persentase fasilitas layanan administrasi kantor tepat waktu sesuai SOP				